SUMATIF TENGAH SEMESTER (STS) GANJIL

SMP KATOLIK "ST. YUSTINUS DE YACOBIS"

TAHUN AJARAN 2024 – 2025

NAMA :
KELAS :
NO. PESERTA :

A. JAWABLAH DENGAN TEPAT!!!!

1. Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan undang-undang baru tentang perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Bagaimana hubungan antara pengesahan undang-undang ini dengan Pancasila dan UUD 1945?
    A. Undang-undang tersebut bertentangan dengan Pancasila karena tidak mencakup semua sila.
    B. Undang-undang tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, serta selaras dengan UUD 1945.
    C. Undang-undang tersebut tidak relevan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
    D. Undang-undang tersebut lebih fokus pada UUD 1945 daripada Pancasila.

2. Sebuah organisasi masyarakat di Indonesia mengusulkan perubahan konstitusi untuk memberikan hak otonomi yang lebih luas kepada daerah-daerah dengan kebudayaan yang berbeda. Bagaimana proposal tersebut terkait dengan Pancasila dan UUD 1945?

    A. Proposal tersebut bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.

    B. b) Proposal tersebut mendukung implementasi Pancasila dengan memberikan kebebasan dalam keragaman.

    C. c) Proposal tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 karena mengabaikan prinsip persatuan.

    D. d) Proposal tersebut tidak relevan dengan UUD 1945 atau Pancasila.

3. Dalam sebuah sidang parlemen, beberapa anggota dewan berargumen bahwa Pancasila sebagai ideologi negara harus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagaimana pandangan ini berhubungan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945?

    A. Pancasila adalah ideologi yang harus tetap tidak berubah, sesuai dengan UUD 1945 yang menegaskannya.

    B. Perubahan pada Pancasila dapat dilakukan jika sejalan dengan perubahan dalam UUD 1945.

    C. Pancasila bisa diperbarui secara berkala tanpa harus mengubah UUD 1945.

    D. Pancasila tidak boleh diubah, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.

LIVEWORKSHEETS

4. Sebuah kelompok masyarakat mengajukan petisi untuk mengubah pasal dalam UUD 1945 yang menyangkut hak-hak asasi manusia agar lebih mengakomodasi kebutuhan kontemporer. Bagaimana pengajuan petisi ini berhubungan dengan Pancasila dan UUD 1945?

   A. Petisi ini bertentangan dengan Pancasila karena menambah beban pada pemerintah.

   B. Petisi ini sesuai dengan prinsip Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan hak asasi manusia.

   C. Petisi ini hanya relevan dengan UUD 1945 tanpa mempertimbangkan Pancasila.

   D. Petisi ini bisa diterima jika disetujui oleh semua pihak dalam UUD 1945.

5. Pemerintah menerapkan kebijakan pendidikan baru yang mengharuskan semua sekolah mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kurikulum mereka. Apa hubungan kebijakan ini dengan Pancasila dan UUD 1945?

   A. Kebijakan ini tidak relevan dengan Pancasila dan UUD 1945.

   B. Kebijakan ini mendukung Pancasila dan UUD 1945 dengan memperkuat pemahaman ideologi negara.

   C. Kebijakan ini hanya relevan untuk Pancasila dan tidak untuk UUD 1945.

   D. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip kebebasan pendidikan yang diatur dalam UUD 1945.

6. Sebuah keputusan pengadilan tinggi menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan berbicara melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Apa relevansi keputusan ini dengan Pancasila?

   A. Keputusan ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak mempengaruhi hak asasi manusia.

   B. Keputusan ini mendukung prinsip Pancasila tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial.

   C. Keputusan ini bertentangan dengan Pancasila yang memberikan hak penuh kepada pemerintah.

   D. Keputusan ini tidak mempengaruhi implementasi Pancasila dalam hukum.

LIVEWORKSHEETS

7. Pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam. Bagaimana keputusan ini sejalan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945?

   A. Keputusan ini bertentangan dengan prinsip persatuan Pancasila dan UUD 1945.

   B. Keputusan ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

   C. Keputusan ini tidak mempengaruhi implementasi Pancasila dan UUD 1945.

   D. Keputusan ini mengabaikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila.

8. Sebuah partai politik mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk menambahkan ketentuan khusus tentang hak ekonomi bagi setiap warga negara. Apa implikasi amandemen ini terhadap Pancasila dan UUD 1945?

   A. Amandemen ini mendukung nilai-nilai keadilan sosial dari Pancasila dan UUD 1945.

   B. Amandemen ini mengabaikan prinsip Pancasila dan hanya berfokus pada perubahan UUD 1945.

   C. Amandemen ini bertentangan dengan prinsip persatuan Pancasila.

   D. Amandemen ini tidak memiliki dampak pada penerapan Pancasila atau UUD 1945.

9. Sebuah lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak minoritas dalam kebijakan publik yang baru. Bagaimana permintaan ini berhubungan dengan Pancasila dan UUD 1945?

   A. Permintaan ini sesuai dengan sila-sila Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan hak asasi manusia.

   B. Permintaan ini bertentangan dengan prinsip Pancasila yang menekankan kesatuan.

   C. Permintaan ini hanya relevan dengan UUD 1945 tanpa memerlukan perubahan dalam Pancasila.

   D. Permintaan ini tidak berhubungan dengan Pancasila atau UUD 1945.

LIVEWORKSHEETS

10. Sebuah program pemerintah baru bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan di antara berbagai suku dan agama di Indonesia dengan meluncurkan kampanye yang mengedepankan keberagaman sebagai kekuatan. Bagaimana program ini mencerminkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila?

    A. Program ini bertentangan dengan Pancasila karena mengabaikan nilai-nilai persatuan.

    B. Program ini mendukung Bhinneka Tunggal Ika dengan memperkuat keberagaman dan kesatuan, sesuai dengan Pancasila.

    C. Program ini hanya fokus pada Pancasila dan tidak mempertimbangkan Bhinneka Tunggal Ika.

    D. Program ini mengabaikan Bhinneka Tunggal Ika dan hanya berfokus pada UUD 1945.

11. Sebuah daerah di Indonesia memutuskan untuk merayakan festival budaya yang mencakup semua kelompok etnis yang ada di wilayah tersebut untuk menunjukkan keragaman budaya. Bagaimana pelaksanaan festival budaya ini terkait dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila?

    A. Festival ini tidak relevan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.

    B. Festival ini mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika dengan merayakan keragaman dan memperkuat rasa persatuan.

    C. Festival ini bertentangan dengan Pancasila karena tidak mempromosikan kesatuan.

    D. Festival ini hanya fokus pada UUD 1945 tanpa mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila.

12. Dalam rapat pemerintah daerah, ada usulan untuk memberikan hak istimewa kepada kelompok minoritas agar hak mereka lebih terjamin. Apa dampak dari usulan tersebut terhadap prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan implementasi Pancasila?

    A. Usulan ini tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang menekankan persatuan.

    B. Usulan ini mendukung Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan menjamin hak kelompok minoritas dalam keragaman.

    C. Usulan ini bertentangan dengan prinsip Pancasila yang menekankan kesetaraan di seluruh lapisan masyarakat.

    D. Usulan ini hanya relevan dengan UUD 1945 tanpa mempertimbangkan Pancasila.

LIVEWORKSHEETS

13. Sekolah-sekolah di seluruh Indonesia diminta untuk mengajarkan sejarah lokal dan nasional secara seimbang untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman budaya. Bagaimana kebijakan ini berhubungan dengan Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika?

    A. Kebijakan ini mendukung Bhinneka Tunggal Ika dengan meningkatkan pemahaman tentang keberagaman sambil tetap mematuhi Pancasila.

    B. Kebijakan ini tidak relevan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

    C. Kebijakan ini bertentangan dengan Pancasila dan prinsip kesatuan.

    D. Kebijakan ini hanya berfokus pada UUD 1945 tanpa mempertimbangkan Pancasila.

14. Sebuah lembaga swadaya masyarakat melaporkan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok minoritas dalam akses pendidikan dan meminta intervensi pemerintah untuk memperbaiki situasi tersebut. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap laporan tersebut seharusnya mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila?

    A. Tanggapan pemerintah seharusnya mengabaikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan fokus pada penegakan hukum.

    B. Tanggapan pemerintah harus mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika dengan memastikan hak-hak semua kelompok terjamin, sesuai dengan Pancasila.

    C. Tanggapan pemerintah seharusnya tidak mempertimbangkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

    D. Tanggapan pemerintah seharusnya hanya berfokus pada aspek UUD 1945.

15. Pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang membatasi pendirian rumah ibadah di daerah-daerah yang sudah memiliki rumah ibadah yang cukup. Bagaimana kebijakan ini terkait dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila?

    A. Kebijakan ini mendukung Pancasila dengan membatasi potensi konflik antaragama.

    B. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan kebebasan beragama dan keberagaman.

    C. Kebijakan ini tidak relevan dengan Pancasila dan hanya berfokus pada UUD 1945.

    D. Kebijakan ini sesuai dengan Pancasila dan tidak mempengaruhi prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

LIVEWORKSHEETS

16. Sebuah provinsi di Indonesia mengalami ketegangan sosial antara kelompok etnis yang berbeda. Pemerintah pusat meluncurkan program dialog antarbudaya untuk mengurangi ketegangan. Bagaimana program ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika?

    A. Program ini mendukung nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan mempromosikan dialog dan kerjasama di tengah keragaman.

    B. Program ini hanya fokus pada Pancasila tanpa memperhatikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

    C. Program ini tidak berhubungan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

    D. Program ini bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

17. Ada usulan untuk mengubah kurikulum pendidikan nasional agar lebih menekankan pada sejarah dan budaya daerah untuk memperkuat identitas lokal. Apa hubungan antara usulan perubahan kurikulum ini dengan Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika?

    A. Usulan ini mendukung Bhinneka Tunggal Ika dengan menghargai keberagaman budaya lokal sambil tetap mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Pancasila.

    B. Usulan ini tidak relevan dengan Pancasila dan hanya berhubungan dengan UUD 1945.

    C. Usulan ini bertentangan dengan Pancasila dan prinsip persatuan.

    D. Usulan ini hanya fokus pada Bhinneka Tunggal Ika tanpa memperhatikan Pancasila.

18. Pemerintah daerah memutuskan untuk memperkenalkan program bantuan sosial khusus untuk kelompok etnis yang kurang beruntung secara ekonomi. Bagaimana program ini sesuai dengan prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika?

    A. Program ini mendukung Pancasila dengan memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua kelompok, mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika.

    B. Program ini tidak mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan hanya fokus pada Pancasila.

    C. Program ini bertentangan dengan Pancasila karena hanya memprioritaskan kelompok tertentu.

    D. Program ini hanya berhubungan dengan UUD 1945 tanpa mempertimbangkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

LIVEWORKSHEETS

19. Setelah terjadinya konflik antarkelompok di suatu daerah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk mempererat hubungan antar kelompok melalui program pelatihan toleransi dan pemahaman lintas budaya. Bagaimana kebijakan ini berhubungan dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila?

    A. Kebijakan ini mendukung Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dengan mempromosikan toleransi dan integrasi antar kelompok.

    B. Kebijakan ini hanya relevan dengan Pancasila dan tidak mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

    C. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

    D. Kebijakan ini hanya fokus pada UUD 1945 tanpa mempertimbangkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

20. Pemerintah daerah mengusulkan untuk mengubah batas wilayah administratif untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan lokal. Bagaimana usulan perubahan batas wilayah ini terkait dengan prinsip Pancasila dan NKRI menurut UUD 1945?

    A. Usulan ini bertentangan dengan prinsip NKRI karena bisa mengancam kesatuan negara.

    B. Usulan ini sesuai dengan prinsip NKRI jika dilakukan dengan memperhatikan integrasi dan keutuhan negara, serta sejalan dengan Pancasila.

    C. Usulan ini hanya relevan dengan Pancasila tanpa mempertimbangkan prinsip NKRI.

    D. Usulan ini tidak mempengaruhi Pancasila atau NKRI.

21. Beberapa daerah di Indonesia mengajukan permohonan untuk memiliki otonomi lebih luas dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan lokal. Apa hubungan antara permohonan otonomi lebih luas ini dengan Pancasila dan prinsip NKRI dalam UUD 1945?

    A. Permohonan ini bertentangan dengan NKRI karena dapat mengancam persatuan nasional.

    B. Permohonan ini mendukung prinsip Pancasila dan NKRI jika dijalankan dalam kerangka negara kesatuan.

    C. Permohonan ini relevan dengan Pancasila tetapi tidak dengan prinsip NKRI.

    D. Permohonan ini tidak mempengaruhi Pancasila dan hanya berfokus pada UUD 1945.

LIVEWORKSHEETS

22. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi utama. Bagaimana rencana pembangunan ini mencerminkan hubungan antara Pancasila dan NKRI?

    A. Rencana ini mendukung NKRI dan Pancasila dengan meningkatkan kesatuan dan integrasi nasional.

    B. Rencana ini tidak relevan dengan Pancasila dan hanya berhubungan dengan aspek administrasi.

    C. Rencana ini bertentangan dengan prinsip Pancasila karena hanya fokus pada pengembangan ekonomi.

    D. Rencana ini tidak mempengaruhi NKRI atau Pancasila.

23. Pemerintah mengadakan dialog nasional untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan keberagaman dan kesatuan dalam kerangka NKRI. Bagaimana dialog nasional ini berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip NKRI?

    A. Dialog ini mendukung prinsip Pancasila dan NKRI dengan membahas pentingnya persatuan dalam keberagaman.

    B. Dialog ini tidak relevan dengan NKRI dan hanya berfokus pada Pancasila.

    C. Dialog ini bertentangan dengan prinsip Pancasila karena tidak menekankan kesatuan.

    D. Dialog ini hanya berhubungan dengan UUD 1945 tanpa mempertimbangkan Pancasila dan NKRI.

24. Sebuah daerah yang baru saja bergabung dengan NKRI mengusulkan kebijakan lokal yang berbeda dari kebijakan nasional untuk mencerminkan budaya lokal mereka. Apa dampak dari kebijakan lokal tersebut terhadap prinsip NKRI dan Pancasila?

    A. Kebijakan ini dapat mendukung NKRI dan Pancasila jika kebijakan lokal tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional dan tetap dalam kerangka NKRI.

    B. Kebijakan ini tidak relevan dengan Pancasila dan NKRI.

    C. Kebijakan ini bertentangan dengan Pancasila dan dapat mengancam keutuhan NKRI.

    D. Kebijakan ini hanya berfokus pada Pancasila tanpa mempertimbangkan prinsip NKRI.

LIVEWORKSHEETS

25. Pemerintah daerah mengusulkan pembuatan undang-undang lokal yang bertujuan untuk memperkuat hak-hak budaya masyarakat adat di wilayah mereka. Apa hubungan antara usulan undang-undang lokal ini dengan Pancasila dan prinsip NKRI?

A. Usulan ini mendukung prinsip Pancasila dengan memberikan ruang untuk keberagaman budaya, selama tetap sejalan dengan NKRI.

B. Usulan ini tidak relevan dengan Pancasila dan NKRI.

C. Usulan ini bertentangan dengan prinsip NKRI dan dapat merusak kesatuan negara.

D. Usulan ini hanya berfokus pada Pancasila tanpa mempertimbangkan prinsip NKRI.

B. MENJODOHKAN!!

1.

a	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing			Pasal 28A
b	Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.			Pasal 29 Ayat (2)
c	Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan adalah hak asasi manusia			Pasal 31 Ayat (1)
d	Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan			Pasal 18B Ayat (2)
e	Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.			Pasal 33 Ayat (1)

2.

a	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar			Pasal 18B Ayat (2)
b	Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat			Pasal 30 Ayat (2)
c	Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan			Pasal 1 Ayat (2)
d	Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara			Pasal 28E Ayat (3)
e	Negara menghormati dan menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul			Pasal 27 Ayat (1)

LIVEWORKSHEETS

3.

NO	PERNYATAAN	B	S
1	Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa. Salah satu factor penyebab dinamika penerapan Pancasila pada tiap-tiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerinta.		
2	Penerapan Pancasila pada masa orde baru, terjadi pada 1959-1966		
3	Dalam penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan ditemui banyak permasalahan, di antaranya kasus KKN.		
4	Pada masa orde lama ditemui beberapa Tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI dipimpin oleh D.N Aidit pada 30 September 1965		

4.

a	Menghargai keragaman budaya, suku, dan bahasa di Indonesia			Sila ke-2
b	Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinan, namun tetap menghormati agama lain			Sila ke-3
c	Menolak sikap rasisme dan diskriminasi di masyarakat			Sila ke-1
d	musyawarah dalam kegiatan masyarakat tanpa memandang suku atau agama			Sila ke-5
e	Memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang			Sila ke-4

5.

a	Mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam menghadapi perbedaan pendapat			Sila ke-4
b	Musyawarah mufakat dijalankan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, tanpa memandang perbedaan			Sila ke-2
c	Menjaga perdamaian di antara kelompok-kelompok berbeda keyakinan di masyarakat			Sila ke-3
d	Mengakui kebebasan individu dalam masyarakat yang majemuk dan menghormati agama masing-masing			Sila ke-5
e	Berperilaku adil dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.			Sila ke-1

LIVEWORKSHEETS